



Sumber Konflik Pemberontakan DI/TII di Aceh Dalam Novel *Napoleon Dari Tanah Rencong* Karya Akmal Nasery Basral

Achmad Abimubarak^{1*}

Ade Hikmat¹

Prima Gusti Yanti¹

¹Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia

*email: a_abimubarak@uhamka.ac.id

Abstrak

Perjuangan rakyat Aceh untuk mendapatkan keistimewaan otonomi daerah telah dinovelisasi oleh Akmal Nasery Basral melalui novel *Napoleon dari Tanah Rencong*. Perjuangan tersebut banyak menimbulkan konflik sehingga peneliti melakukan peninjauan sumber konflik pada novel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber konflik atas segala permasalahan yang terdapat dalam novel ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber konflik terdiri atas internal dan eksternal. Dalam novel ini, pengarang terlihat mendukung pemberontakan DI/TII di Aceh untuk menuntut Aceh menjadi provinsi daerah istimewa. Pengarang selalu memperlihatkan kesetujuannya terhadap saran-saran, argumen-argumen, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hasan Saleh sebagai tokoh utama. Kesetujuan pengarang itu juga terlihat saat menyampaikan keheranan Hasan Saleh kepada masyarakat yang tetap ingin adanya pemberontakan untuk mendirikan negara Aceh.

Kata kunci: Sumber Konflik; Strukturalisme Genetik; DI/TII Aceh;

Received: 17 Februari 2021

Accepted: 22 Maret 2021

Published: 22 Maret 2021

doi: [10.22236/imajeri.v3i2.6538](https://doi.org/10.22236/imajeri.v3i2.6538)



© 2021 Oleh authors. Lisensi Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Uhamka, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract

The struggle of the Acehnese people to obtain regional autonomy privileges has been analyzed by Akmal Nasery Basral through the novel Napoleon dari Tanah Rencong. This struggle caused a lot of conflict so that the researchers conducted a review of the source of the conflict in the novel. This study aims to analyze the sources of conflict over all the problems contained in this novel. The method used is qualitative research using a genetic structuralism approach. The results showed that the sources of conflict consisted of internal and external. Limited resources and different perceptions are the source of internal conflict between DI / TII Aceh. In this novel, the author is seen supporting the DI / TII rebellion in Aceh to demand that Aceh be a special regional province. The author always shows his approval of suggestions, arguments, or actions taken by Hasan Saleh as the main character. The author's agreement was also seen when conveying Hasan Saleh's amazement to the people who still wanted a rebellion to establish the state of Aceh.

Keywords: Source of Conflict; Genetic Structuralism; DI/TII Aceh



PENDAHULUAN

Novel setidaknya memiliki empat hal khusus yang membedakannya dengan karya sastra lain. Keempat hal tersebut yakni fiksi, artinya bersifat imajinatif; prosa, artinya tidak mementingkan bentuk metrum, rima, maupun irama; naratif, artinya bersifat menceritakan sesuatu; alur yang kompleks, artinya cerita dimulai dari awal hingga akhir (Solihati et al., 2016). Dari keempat hal khusus itu, novel dapat kita definisikan sebagai sebuah karya fiksi berbentuk prosa yang bersifat naratif dengan alur yang kompleks.

Novel banyak memberikan gambaran konflik tentang kehidupan. Konflik yang dialami pun tidak langsung puncak, melainkan ada prosesnya. Proses terjadinya konflik itulah yang menjadikan novel lebih menarik untuk dibaca. Dalam penyusunan konflik ini, pengarang perlu berpikir keras untuk membuat konflik lebih dramatis namun relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konflik dalam novel menurut Wellek dan Warren adalah sesuatu yang dramatik (Wellek & Warren, 2016).

Konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan dengan latar belakang yang beragam, seperti kepentingan, perbedaan pendapat, dan sebagainya (Pickering, 2006). Konflik menjadi hal yang selalu dihadirkan di dalam novel. Konflik tersebut dapat terjadi jika satu pihak merasa bahwa kepentingannya ditentang atau secara negatif memengaruhi pihak lain (McShane & Glinow, 2010). Jika kita kaitkan konflik tersebut ke dalam karya sastra, konsepnya tetaplah sama. Para tokoh dalam karya sastra sering berkonflik atau sering timbul pertentangan dengan sebab yang beragam.

Konflik banyak disuguhkan dalam novel *Napoleon dari Tanah Rencong* karya Akmal Nasery Basral. Novel ini memberikan gambaran tentang konflik yang bernuansa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh. Pemberontakan tersebut terjadi karena masyarakat Aceh menginginkan kedaulatan khusus yaitu syariat Islam. Tetapi, keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah pusat menggabungkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Jika mendengar nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang terbayang adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Ia menginginkan Indonesia menjadi negara Islam namun terbentur oleh pemufakatan UUD 1945. Draxler menyatakan bahwa Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) mulai berbasis di Jawa Barat. Dengan dukungan yang signifikan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, mereka memberontak terhadap pemerintah pusat. Gerakan bersenjata ini berusaha membentuk negara Islam di seluruh Indonesia (Drexler, 2007).

Aceh mulai bergabung dengan DI/TII menurut Aning dalam Hanna pada tanggal 20 September 1953 (Hanna, 2010). Lebih lanjut Fahmi menerangkan bahwa gerakan DI/TII ini adalah sebuah perang yang bertujuan untuk menegakkan sistem syariat Islam di Aceh. Faktor pendukung bergabungnya Aceh ke DI/TII karena adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat di Jakarta (Fahmi, 2012). Perlakuan tidak adil itu menurut Saleh adalah pembubaran Provinsi Otonomi Aceh berdasarkan PP No. 21 Tahun 1950 tanggal 20 Agustus 1950. Akibatnya, Provinsi Aceh harus dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara dengan ibukotanya Medan (Saleh, 1992).



Novel *Napoleon dari Tanah Rencong* ditulis berdasarkan latar sejarah pemberontakan DI/TII. Secara umum, novelisasi sejarah sudah bukan hal yang asing dalam ranah sastra. Yanti menyatakan bahwa karya sastra merupakan produk manusia atau masyarakat. Sebuah produk yang menggambarkan segala hal yang ada dalam kehidupan manusia atau masyarakat (Yanti, 2014). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahman bahwa kisah dalam novel juga dapat berasal dari kejadian yang nyata, tetapi pengarang tetap memberikan rekayasa cerita agar lebih memiliki unsur dramatisasi dan unsur estetika (Rahman & Hidayat, 2018). Jadi, novelisasi sejarah juga memiliki ruang sastranya karena sejarah merupakan bagian yang selalu menempel pada diri manusia.

Novel *Napoleon dari Tanah Rencong* karya Akmal Nasery Basral pernah diteliti oleh Dwi Desi Fajarsari pada tahun 2017. Penelitiannya membahas dimensi sejarah yang terdiri atas latar sejarah, tokoh sejarah, dan peristiwa sejarah. Peneliti tersebut menyampaikan bahwa peristiwa sejarah pemberontakan DI/TII di Aceh dikemas dengan latar kehidupan Hasan Saleh sebagai tokoh utama yang pada akhirnya dikenal sebagai pahlawan Aceh (Fajarsari, 2017).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada dimensi kajiannya. Penelitian ini akan mendeskripsikan sumber konflik yang berpengaruh dalam pemberontakan DI/TII di Aceh dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas sumber konflik internal. Bagian kedua membahas sumber konflik eksternal. Bagian ketiga membahas pandangan dunia pengarang tentang sumber konflik dalam novel ini. Kajian mengenai sumber konflik ini penting untuk ditelusuri agar kita bisa memahami sebab-sebab munculnya gerakan separatis atau gerakan pemberontakan terhadap pemerintah sehingga sebelum konflik semakin memanas, permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak.

Konflik memiliki sumber yang berbeda-beda. Hampir semua sisi kehidupan dapat menjadi sumber konflik. Sukardi menjelaskan bahwa dasar dari sumber konflik adalah perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dan perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat (Sukardi, 2016). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahyudi bahwa konflik diakibatkan adanya perbedaan persepsi, pendapat dan ketidaksamaan kepentingan (Wahyudi, 2015). Dari dua pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa konflik akan muncul ketika tujuan atau kepentingan itu ditentang. Pertentangan konflik ini akan semakin memanas apabila tidak ada kesepakatan solusi.

Sumber konflik internal, yaitu sumber konflik yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri sering terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya dan perbedaan sifat/nilai/persepsi (Romli, 2014). Keterbatasan sumber daya seperti penyediaan dana, ruang, informasi, serta sumber-sumber penting lainnya sering menjadi sumber konflik. Dalam konteks DI/TII, yang berperang melawan pemerintah Indonesia pasti membutuhkan sumber daya yang lebih besar, seperti senjata, pasukan, dan dana. Jika sumber daya tersebut sulit didapat, akan terjadi konflik sehingga mempengaruhi strategi perang pihak DI/TII melawan pemerintah. Selain sumber daya, perbedaan sifat/nilai/persepsi juga bisa menjadi sumber konflik karena setiap pribadi mewarisi nilai-nilai berdasarkan latar belakang kehidupannya. Sistem nilai merupakan pandangan hidup yang diyakini individu sehingga mempengaruhi perilaku dalam bekerja sama. Demikian halnya cara individu-individu menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerja berpotensi menimbulkan perbedaan-perbedaan.



Sudah dipaparkan di atas bahwa konflik antara DI/TII dengan pemerintah Indonesia disebabkan adanya pembubaran Provinsi Otonomi Aceh berdasarkan PP No. 21 Tahun 1950 tanggal 20 Agustus 1950. Akibatnya, Provinsi Aceh harus dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara dengan ibukotanya Medan (Saleh, 1992). Munculnya peraturan tersebut menjadi sumber konflik eksternal (sumber konflik yang muncul dari luar organisasi) terjadinya peperangan antara sebagian masyarakat Aceh yang mengatasnamakan dirinya DI/TII dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal tersebut, Romli menegaskan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah memang dapat menjadi sumber konflik eksternal (Romli, 2014).

Dari pembahasan konflik internal dan eksternal di atas, penulis akan meninjau pandangan pengarang terhadap sumber konflik peristiwa DI/TII yang ada dalam novel *Napoleon dari Tanah Rencong*. Pengarang sebagai sutradara dalam penulisan novel tentunya punya sudut pandang kepenulisan. Sudut pandang pengarang terhadap penggambaran sumber konflik DI/TII di Aceh bisa saja berpihak atau netral.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan strukturalisme genetik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2015). Penggunaan pendekatan strukturalisme genetik dipilih karena objek penelitian ini berupa teks sastra yang perlu ditinjau latar belakang kepenulisannya. Pengarang tentunya memiliki alasan tentang pemilihan maupun proses penulisan novelnya.

Pada pengumpulan data, peneliti membaca novel dan menyiapkan instrumen penelitian untuk meninjau sumber konfliknya. Kemudian peneliti menandai bagian-bagian teks dalam novel berdasarkan instrumen yang telah dibuat. Terakhir, peneliti menulis bagian-bagian teks yang telah ditandai ke dalam tabel instrumen.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan pola deduktif Philip Mayring yaitu penentuan pertanyaan penelitian serta mendefinisikan secara teoretis aspek-aspek yang terlibat seperti sumber konflik dan pendekatan strukturalisme genetik. Selanjutnya peneliti membuat kriteria analisis, menentukan secara pasti bagian-bagian teks pada novel untuk dimasukkan ke dalam kategori, dan menginterpretasi bagian-bagian teks tersebut sesuai kriteria analisis yang telah dibuat (Mayring, 2000). Tinjauan strukturalisme genetik dilakukan atas tiga langkah. *Pertama*, mengkaji unsur intrinsik sastra. *Kedua*, mengkaji latar belakang kehidupan sosial kelompok pengarang. *Ketiga*, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang (Iswanto, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas tiga hal, yaitu sumber konflik internal, sumber konflik eksternal, dan pandangan pengarang terhadap novel ini. Pembahasan sumber konflik internal dan eksternal ditulis berdasarkan kategori yang paling berpengaruh dalam peristiwa pemberontakan DI/TII di Aceh.



Sumber Konflik Internal

Novel ini menggambarkan bahwa sumber daya yang menjadi sumber konflik adalah material senjata. Senjata merupakan material pokok bagi seorang prajurit ketika berperang. Tanpa adanya senjata, prajurit akan sulit untuk memenangkan pertarungan.

Keterbatasan senjata mampu digambarkan oleh pengarang melalui novel ini. Pada kenyataannya, pihak DI/TII Aceh memang sangat kekurangan senjata, sehingga perang gerilya menjadi salah satu solusi strategi berperang. Keterbatasan senjata menyebabkan pasukan DI/TII hanya sebentar menduduki daerah yang telah direbut, seperti Langsa, Bayeun, Idi, dan Peureulak. Bahkan, Takengon, Tangse, dan Geumpang kembali jatuh ke pihak Republik dan menyebabkan pasukan DI terusir dari daerah-daerah perkotaan.

Keterbatasan material senjata yang menjadi sumber konflik dialami oleh Hasan Saleh saat berdiskusi tentang pemberontakan Aceh kepada pemerintah pusat. Hasan Saleh yang sering mengalami kekurangan senjata saat perang di Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan memberikan pandangan soal keadaan senjata di pihak Republik Indonesia dan bandingannya dengan senjata di pihak Aceh. Berikut kutipannya.

“Pemberontakan sangat berbahaya, Teungku,” jawab Hasan Saleh. “Kita serba kurang dalam persenjataan maupun penduduk dibandingkan Indonesia yang besar dan kuat,” lanjutnya sambil menceritakan kembali pengalamannya menangani pemberontakan di Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan, yang pernah dilakukannya kepada Mustafa. Hanya kali ini karena Yacob Aly ikut serta, Hasan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. “Ini adik saya Yacob ikut dalam dua operasi itu di bagian logistik. Dia adalah saksinya. Dia bisa menjelaskan situasinya.”

“Benar Teungku Hasan Aly. Kekuatan logistik di bidang persenjataan, makanan, dan yang tak kalah penting keuangan, sangat memegang peranan. Jika saya boleh tahu bagaimana persiapan Teungku dan kawan-kawan tentang hal ini?” (hlm. 341)

Hasan Saleh sangat khawatir dengan keadaan material senjata yang dimiliki oleh pihak DI/TII Aceh sehingga menjadi sebab adanya konflik antara Hasan Saleh dengan Mustafa. Hasan Saleh menuturkan bahwa keterbatasan senjata menyebabkan sulitnya bertempur melawan Republik sehingga kemungkinan kalah akan lebih besar. Daud Beureueh sebagai pemimpin mendukung Mustafa bahwa senjata adalah hal lain yang perlahan akan disiapkan. Dari pernyataan Daud Beureueh itu, Hasan Saleh merasa pendapatnya tidak digubris apalagi ia seorang prajurit yang memahami medan perang sehingga motivasinya mengikuti gerakan DI/TII agak menurun.

Kekurangan senjata yang menjadi sumber konflik internal pasukan DI/TII Aceh bukanlah perkara yang asing. Kelompok-kelompok bersenjata lain yang tidak memiliki dana besar pun akan selalu kesulitan dalam meningkatkan kekuatan senjata mereka sehingga sangat rentan menjadi sumber konflik dan perpecahan dalam kelompok tersebut. Hal ini pernah terjadi pada tanggal 18 Juli 2020 bahwa ada lima anggota Operasi Papua Merdeka (OPM) menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Mereka mengaku selalu diliputi ketakutan karena terus diburu oleh pasukan Indonesia. Saat menyerahkan diri pun, mereka hanya memiliki dua butir amunisi (Febrian, 2020). Jika kita lihat dari kejadian ini, kita



bisa menyatakan bahwa pantas saja anggota OPM selalu dihantui ketakutan karena amunisi mereka pun sangat minim. TNI pun bisa mendapatkan berbagai informasi penting mengenai OPM melalui mereka.

Berkaitan dengan kejadian di atas, pada novel ini Hasan Saleh juga sempat memiliki konflik dengan Daud Beureueh karena persoalan strategi memaksimalkan kondisi persenjataan. Berikut kutipannya.

“Peluru adalah inti strategi,” jelas Hasan Saleh setelah tetap tak ada yang memberikan jawaban. “Apakah sisa peluru kita yang sedikit itu mau digunakan semuanya untuk mempertahankan markas Tangse di Gle Meulinteung ini, lalu kita menyerah seperti dilakukan Cumbok dulu? ...

...Pikiran Hasan teringat Mayor Hasballah Haji yang di saat-saat terakhir menolak bergabung dengan DI: inikah yang dikhawatirkan Hasballah sebenarnya, namun tak disampaikannya secara terus terang? (hlm 369-370)

Dari kutipan di atas, kita dapat melihat bahwa persenjataan dapat menjadi sumber konflik internal yang bisa menjadi penyebab perpecahan sebuah gerakan bersenjata. Jika kita kaitkan dengan kejadian anggota OPM di atas, Hasan Saleh bisa saja melakukan hal itu seperti Mayor Hasballah Haji sehingga kubu DI/TII Aceh akan pecah dan kehilangan orang yang lihai dalam membuat strategi perang. Namun, hal tersebut tidak dilakukan Hasan Saleh sebab dirinya masih menghormati Daud Beureueh sebagai ulama.

Perbedaan sifat, nilai-nilai yang dianut, persepsi atau pandangan pribadi juga menjadi sumber konflik internal dalam pemberontakan DI/TII Aceh dalam novel ini. Pada satu peristiwa Bung Hatta memiliki perbedaan persepsi dengan pemimpin Provinsi Aceh, yaitu Daud Beureueh. Persepsi Bung Hatta, Indonesia merupakan negara kesatuan, maka tidak ada perbedaan bagi tiap-tiap daerahnya. Persepsi Bung Hatta tidak sejalan dengan Daud Beureueh yang tetap menginginkan Aceh memiliki kedaulatan khusus dalam menjalankan syariat Islam. Permintaan kedaulatan khusus ini disebabkan karena Provinsi Aceh sedari kerajaan Samudera Pasai sudah menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga, rakyat Aceh sudah terbiasa dengan pola hidup yang sejalan dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, perbedaan persepsi ini menjadi sumber konflik antara Bung Hatta dengan Daud Beureueh. Berikut kutipannya.

... Bung Hatta beradu argumen dengan para pemimpin Aceh, yang silih berganti mengisi mimbar yang telah disediakan. Menurut Bung Hatta, keinginan Aceh yang ingin menerapkan syariat Islam tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang sejak awal diniatkan bagi Indonesia Merdeka. (hlm. 237)

Perbedaan persepsi juga ditampilkan saat Hasan Saleh mencoba memberikan pandangan militer kepada Daud Beureueh tentang kondisi markas di Tangse. Hasan Saleh yang banyak pengalaman militer memberikan pandangan bahwa Tangse akan segera dibumihanguskan oleh tentara Republik. Namun, Daud Beureueh yang bukan seorang militer memiliki pandangan sendiri, yaitu pasukan DI/TII tetap berada di Tangse. Daud Beureueh pun memberikan perintah langsung bahwa keputusan yang telah diambil sudah bulat.



Perbedaan pandangan antara Daud Beureueh dengan Hasan Saleh hampir menyebabkan DI/TII hancur dan menghentikan pemberontakan. Untung saja ada sosok Nyak Ahmad yang benar-benar berani melawan Daud Beureueh sehingga Daud Beureueh dan pasukan DI/TII meninggalkan Tangse sebelum tentara Republik membumihanguskan Kota Tangse.

... “Keputusan sudah kami ambil, Teungku,” katanya kepada Panglima Beureueh di ujung seberang, “Teungku dan para pembesar lain besok harus menyingkir karena Glee Meulinteung akan kami kosongkan,” katanya sambil meletakkan telepon. (hlm. 379)

Di akhir perjuangan, Hasan Saleh memiliki perbedaan nilai-nilai dengan Daud Beureueh. Perbedaan nilai itu terletak di tujuan pemberontakan Aceh. Hasan Saleh memandang bahwa perjuangan pemberontakan telah bergeser. Daud Beureueh yang memandang bahwa Aceh bisa menjadi negara yang mandiri. Perbedaan nilai yang dianut oleh Hasan Saleh dan Daud Beureueh menyebabkan terjadinya konflik berkelanjutan, yaitu Hasan Saleh dipecat secara tidak hormat, kemudian Hasan Saleh melakukan kudeta terhadap Daud Beureueh. Hasil dari kudeta itu adalah terwujudnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berikut kutipannya.

Rentetan acara itu membuat Hasan Saleh baru menyadari satu hal prinsip: bahwa fokus perjuangan telah bergeser dari niat awal menuntut otonomi Provinsi Aceh dipulihkan Pemerintah Pusat dari hanya sebagai bagian Provinsi Sumatra Utara, menjadi sebuah upaya untuk menjadikan Aceh sebagai negara mandiri lengkap dengan semua aparturnya meski masih dalam koridor Negara Islam Indonesia. (hlm. 410)

Perbedaan sifat, nilai-nilai yang dianut, persepsi, atau pandangan pribadi dapat menjadi sumber konflik dalam perjalanan sebuah kelompok atau organisasi. Pada novel ini, dampak perbedaan tersebut adalah terpecahnya DI/TII menjadi dua kubu, yakni kubu Hasan Saleh dan kubu Daud Beureueh. Kubu Hasan Saleh menilai bahwa perjuangan DI/TII telah bergeser, tidak sesuai tujuan awal yakni menjadikan Aceh sebagai daerah yang wajib menjalankan syariat Islam. Kubu Daud Beureueh menganggap bahwa Aceh sudah semestinya menjadi sebuah negara Islam.

Sumber Konflik Eksternal

Munculnya pemberontakan DI/TII Aceh bersumber dari adanya regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah pusat membubarkan Provinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Provinsi Sumatra Utara dinilai menjadi sebab munculnya pemberontakan DI/TII. Kebijakan pemerintah daerah juga sering menimbulkan konflik karena dinilai tidak netral dan merugikan kalangan ulama.

“Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Seru Sekalian Alam dan Atas Nama Pemerintah. Dengan ini saya umumkan bahwa sejak saat ini status Provinsi Aceh



dicabut kembali dan seluruh kabupatennya digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Sekian. Wassalamualaikumawarahmatullahi wabarakatuh.” (hlm. 268)

Kebijakan pemerintah pusat mengenai peleburan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara menjadi sumber konflik utama pada munculnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Kekecewaan ini menyulut masyarakat Aceh untuk memberontak karena Provinsi Aceh yang sedari awal meminta kedaulatan khusus menjalankan syariat Islam. Kebijakan pemerintah dinilai telah mengkhianati perjuangan rakyat Aceh yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu, pemberontakan DI/TII di Aceh menjadi jalan keluar untuk membuka mata pemerintah bahwa kebijakannya telah keliru.

Setelah munculnya peraturan pemerintah tentang status Aceh, maka ada reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh yakni adanya mosi yang disertai penjelasan tentang alasan untuk memberikan status tersendiri untuk Aceh. DPRD Aceh juga mengungkapkan akan meletakkan jabatannya jika tuntutan itu tidak diterima oleh pemerintah pusat. Reaksi tersebut tidak memunculkan konflik kelembagaan. DPRD Aceh sebagai penyambung lidah sebagian rakyat Aceh mengutarakan keresahan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat.

Kebijakan pemerintah sebagai sumber konflik eksternal munculnya gerakan separatis seperti DI/TII Aceh bukan hal yang baru. Munculnya separatisme di Thailand Selatan juga dianggap sebagai dampak atas berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya adalah penerapan kebijakan nasionalisme Thailand yang berusaha menempatkan budaya Thai lebih tinggi dibandingkan budaya lain, termasuk budaya di Thailand Selatan yang mayoritas beragama Islam (Yuniarto, 2005). Jika kita melihat kasus di Thailand Selatan, permasalahannya hampir sama dengan munculnya gerakan DI/TII di Aceh, yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Pandangan Pengarang terhadap Sumber Konflik DI/TII dalam Novel Napoleon dari Tanah Rencong

Pengarang novel ini, yaitu Akmal Nasery Basral adalah seorang penulis novel yang sering menulis tentang biografi tokoh-tokoh Indonesia, seperti Syafrudin Prawiranegara, Buya Hamka, hingga K.H. Ahmad Dahlan. Tokoh-tokoh yang dinovelisasikan tersebut dikenal juga sebagai tokoh Islam. Pada novel ini, Hasan Saleh sebagai tokoh utama yang dinovelisasikan, juga sangat menjunjung nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Artinya, pengarang sangat dekat dengan kehidupan yang Islami dalam menuliskan karya-karyanya.

Konteks Islam dalam isi novel ini ternyata relevan dengan kehidupan pengarang. Pengarang selain menjadi jurnalis dan penulis karya fiksi, juga seorang ulama yang sering berceramah di berbagai tempat. Oleh karena itu, dapat dihubungkan konteks Islam yang selalu ditawarkan oleh pengarang berasal dari profil dirinya yang merupakan seorang ulama.

Konflik yang digambarkan dalam novel ini, khususnya antara Hasan Saleh dengan Daud Beureueh, pengarang lebih mengedepankan atau bahkan menyetujui segala konsep-konsep yang digagas oleh Hasan Saleh. Hal tersebut tidaklah aneh karena sumber data yang penulis gunakan adalah autobiografi karya Hasan Saleh. Dan informasi-informasi lainnya pengarang dapatkan dari anak Hasan Saleh, yakni Iqbal Hasan.



Ada satu peristiwa yang dituliskan dengan sangat detail oleh pengarang mengenai sumber konflik sebelum pecahnya pemberontakan DI/TII, yaitu adanya perlawanan terhadap pemerintah PUSA (Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh). Perlawanan itu dipimpin oleh Sajid Ali Alsaqaf dan Waki Harun yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Daud Beureueh terhadap keadaan ekonomi dan dugaan perebutan kekuasaan. Tuduhan-tuduhan lainnya juga bermunculan seperti korupsi besar-besaran, perdagangan gelap, pembunuhan lawan-lawan politik, pengabaian perintah pemerintah pusat, dan penyelewengan pendapatan dari ladang-ladang minyak dan perkebunan. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Sajid Ali Alsaqaf dan Waki Harun secara utuh dijelaskan oleh pengarang dalam novel ini sesuai dengan pernyataan Saleh sebagai saksi pada peristiwa tersebut (Saleh, 1992).

Pada peristiwa lain, ada yang tidak dituliskan oleh pengarang, yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Keinsafan Rakyat (BKR) dengan PUSA saat Presiden Soekarno datang ke Aceh. Demonstrasi BKR membuat slogan-slogan yang menyinggung praktik jelek yang dilakukan oleh pemimpin Aceh, termasuk Daud Beureueh. Demonstrasi PUSA juga membuat slogan-slogan namun ditujukan kepada Soekarno yang dianggap telah mengkhianati Islam dengan mempropagandakan Pancasila, ketimbang Islam sebagai dasar Negara (Dijk, 1987).

Tidak tertulisnya peristiwa tersebut menjadi tidak netralnya pandangan pengarang terhadap pihak lawan PUSA. Padahal jelas peristiwa di atas adalah pertentangan politik yang sifatnya mengular. Pendukung BKR menuntut kepada pemerintah daerah di depan mata Soekarno sebagai usaha mengambil perhatian. BKR berharap banyak kepada Soekarno agar pemerintah daerah yang dikuasai oleh PUSA bisa lengser.

Berbeda dengan BKR, pendukung PUSA melawan demonstrasi dengan menyatakan ketidakpercayaannya kepada Soekarno. Jadi, demonstrasi yang dilakukan bersifat mengular, artinya pendukung BKR mendemonstrasi pemerintah daerah lalu pendukung pemerintah daerah mendemonstrasi pemerintah pusat.

Pengarang juga tidak menjelaskan secara detail sebab dileburnya provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Pengarang hanya menyampaikan bahwa Provinsi Aceh akan dileburkan. Padahal dalam pertimbangan peraturan tersebut, tertulis bahwa tujuan dibentuknya daerah provinsi adalah sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, n.d.). Gaya penulisan pengarang terhadap detail ini dinilai mampu menyetir persepsi pembaca terhadap tindakan pemerintah pusat. Pembaca akan memandang bahwa pemerintah pusat telah semena-mena terhadap Provinsi Aceh.

Pandangan pengarang lainnya yang kurang terang terletak pada perbedaan persepsi dan nilai-nilai antara Hasan Saleh dengan Daud Beureueh mengenai kekuasaan Negara Islam Indonesia (NII). Hasan Saleh memandang bahwa perjuangan pemberontakan telah bergeser, sedangkan Daud Beureueh memandang bahwa Aceh bisa menjadi negara yang mandiri. Perbedaan nilai yang dianut oleh Hasan Saleh dan Daud Beureueh menyebabkan terjadinya konflik berkelanjutan, yaitu Hasan Saleh dipecah secara tidak hormat, kemudian Hasan Saleh melakukan “pengambilalihan kekuasaan” terhadap Daud Beureueh.

Pada kisah ini, pengarang tidak secara tegas menjelaskan tuduhan Hasan Saleh dan pendukungnya terhadap Daud Beureueh. Di dalam novel, pengarang hanya menjelaskan



sebab pengambilalihan kekuasaan karena tidak ada jawaban dari Perdana Menteri (Negara Islam Indonesia) yaitu Hasan Aly terhadap negosiasi yang dilakukannya untuk mengembalikan Ayah Gani dan Hasan Saleh ke dalam struktural NII. Padahal, sebab pengambilalihan kekuasaan karena Hasan Saleh dan pendukungnya menuduh Daud Beureueh telah bertindak sewenang-wenang dan ancaman terhadap Hasan Saleh semakin besar (Dijk, 1987).

Pengarang juga tidak mengatakan dengan tegas bahwa Hasan Saleh dan pendukungnya melakukan kudeta terhadap Daud Beureueh. Pengarang hanya menuliskan bahwa “kekuasaan telah diambil alih” bukan “kudeta” atau “pengambilalihan kekuasaan secara paksa.” Pengubahan bahasa yang lebih halus membuat konflik antara Daud Beureueh dan Hasan Saleh terasa kurang klimaks dan menyiratkan segala gagasan Hasan Saleh adalah yang paling baik.

Konflik antara Hasan Saleh dengan Daud Beureueh yang dimunculkan pengarang menyiratkan gagasan bahwa pengarang menyetujui konsep perdamaian yang digagas oleh Hasan Saleh. Dalam pertempuran untuk mempertahankan syariat Islam di Aceh bisa dilakukan dengan berunding. Walaupun dengan senjata tetap bisa dilakukan namun jangka waktunya tidak akan lama. Pasukan DI/TII yang sangat kekurangan material senjata, hingga sumber daya manusia menjadi sebab bahwa antara DI/TII dengan pemerintah Indonesia harus berunding. Apalagi, dari pemerintah Indonesia sudah memberi isyarat bahwa Aceh perlu menggunakan konsep yang lebih masuk akal.

Dari pembahasan di atas, konflik antartokoh yang ditinjau dari pandangan dunia pengarang memiliki gagasan bahwa perundingan menjadi konsep yang disetujui oleh pengarang dalam penentuan konsep perpolitikan di Aceh. Perang hanya menyebabkan pertumpahan darah dan menambah ketakutan pada masyarakat. Walaupun konflik antartokoh tersebut terus berlangsung meski sudah berdiri Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pengarang tetap memberikan pandangannya tentang gagasan Hasan Saleh bahwa perundingan merupakan hal yang paling dimungkinkan untuk membawa kembali syariat Islam di tanah Aceh.

KESIMPULAN

Perbedaan persepsi dan nilai-nilai menjadi sumber konflik internal yang dominan. Perbedaan persepsi, terutama antara Hasan Saleh dengan Daud Beureueh sering membuat strategi perang berantakan dan menyulitkan perjuangan tentara Aceh. Regulasi dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara merupakan sumber konflik eksternal. Sebagian rakyat Aceh kecewa terhadap keputusan tersebut sehingga mereka mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh sebagai bentuk pemberontakan.

Dalam novel ini, pengarang terlihat mendukung pemberontakan DI/TII di Aceh untuk menuntut Aceh menjadi provinsi daerah istimewa. Pengarang selalu memperlihatkan kesetujuannya terhadap saran-saran, argumen-argumen, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hasan Saleh. Kesetujuan pengarang itu juga terlihat saat menyampaikan



keheranan Hasan Saleh kepada masyarakat yang tetap ingin adanya pemberontakan untuk mendirikan negara Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dijk, C. van. (1987). *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Drexler, E. F. (2007). The Social Life of Conflict Narratives: Violet Antagonists, Imagined Histories, and Foreclosed Futures in Aceh, Indonesia. *Project Muse*, 80(4), 968. <https://doi.org/10.1353/anq.2007.0060>
- Fahmi, C. (2012). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh: Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006. *Jurnal Tsafqah*, 8(2), 307.
- Fajarsari, D. D. (2017). Sejarah dalam Sastra: Kajian Strukturalisme Gebetik terhadap Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer, Lingkar Tanah Lingkar Air Karya Ahmad Tohari, dan Napoleon dari Tanah Rencong Karya Akmal Nasery Basral. *PIBSI XXXIX, November*, 975–985. <http://eprints.undip.ac.id/59003/>
- Febrian, A. R. (2020). *5 Orang Anggota OPM Menyerahkan Diri pada TNI*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/5-orang-anggota-opm-menyerahkan-diri-pada-tni-1trxDu0nAvR/full>
- Hanna, S. (2010). Pencegahan Penodaan Agama: Kajian Atas UU No. Tahun 1965. *Religia*, 13(2), 159.
- Iswanto. (2003). Penelitian Sastra dalam Perspektif Strukturalisme Genetik. In Jabrohim (Ed.), *Metodologi Penelitian Sastra* (p. 62). Hanindita Graha Widya.
- Mayring, P. (2000). *Qualitative Content Analysis*. Forum Qualitative Sozialforschung (Social Research). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385#g4>
- McShane, S., & Glinow, M. A. Von. (2010). *Organizational Behavior*. McGraw-Hill Irwin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Daerah Propinsi, Pub. L. No. 21 Tahun 1950, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77187/pp-no-21-tahun-1950>
- Pickering, P. (2006). *How To Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik (Edisi Ketiga)* (M. Maris (ed.)). Erlangga.
- Rahman, F., & Hidayat, R. (2018). Kearifan Lokal dan Benturan Budaya Orang Indonesia di Negara Luar dalam Novel Edensor Karya Andrea Hirata. *Bahastra*, 38(1), 35.
- Romli, K. (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Grasindo.
- Saleh, H. (1992). *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*. Pustaka Utama Grafiti.
- Solihati, N., Hikmat, A., & Syarif Hidayatullah. (2016). *Teori Sastra: Pengantar Kesusastraan Indonesia*. UHAMKA Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 46(1), 78.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik: Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 1.
- Wellek, R., & Warren, A. (2016). *Teori Kesusastraan* (M. Budianta (ed.)). Gramedia.
- Yanti, P. G. (2014). Representasi Gender dalam Novel Cabaukan, Kembang Jepon, Kerudung Merah Kirmizi. *International Conference on Education 2014 (ICEdu14)*, 130.
- Yuniarto, P. R. (2005). Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 7(1), 89–118. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/213>